

Panduan Sayembara Penelitian Perkumpulan Prakarsa

"Alokasi dan Efektifitas Penganggaran Bagi Pencapaian MDGs dan Pengarusutamaan *Pro Poor Budget*"

I. LATAR BELAKANG

Kebijakan pro rakyat miskin (*pro poor policy*) merupakan tindakan politik yang bertujuan mengalokasikan hak-hak dan sumber daya kepada perorangan, organisasi, dan wilayah yang terpinggirkan oleh negara dan pasar (Moore dan Putzel, 2000)¹. Sebagai turunan dari *pro poor policy*, anggaran pro rakyat miskin (*pro poor budget*) adalah hal yang sangat penting dari sebuah upaya pengentasan kemiskinan dan pemenuhan hak-hak dasar warga negara. Implementasi *pro poor budget* dalam proses penganggaran juga akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi riil, penyediaan lapangan kerja, peningkatan pelayanan dasar, dan memperkuat perlindungan sosial, tidak hanya bagi masyarakat miskin tetapi juga semua warga negara (Septyandrica *et al*, 2008). Oleh karenanya, anggaran negara [baca: APBN dan APBD) yang *pro poor* tidak semata-mata dilihat dari besarnya alokasi anggaran bagi rakyat miskin.

Terlepas dari upaya yang telah dilakukan, pemerintah Indonesia belum sepenuhnya mampu mewujudkan anggaran yang pro rakyat miskin. Hal ini lebih disebabkan oleh lemahnya perencanaan dan implementasi anggaran dan bukan karena faktor terbatasnya anggaran (Septyandrica *et al*, 2008). Ini bisa dilihat dari peran sektor pajak sebagai sumber pendapatan yang belum maksimal, masih terbatasnya kebijakan stimulus fiskal serta masih kecilnya alokasi belanja sosial dalam APBN.²

Secara umum, pengarusutamaan anggaran pro rakyat miskin dalam proses penganggaran dapat dilakukan melalui tiga hal, yaitu: (i) memperbaiki sisi pengelolaan keuangan negara dengan mengkoordinasikan kebijakan fiskal dan moneter untuk mendorong stimulus fiskal, pertumbuhan yang pro poor, serta proses penganggaran yang transparan, partisipatif dan akuntabel; (ii) menguatkan sisi pendapatan dengan mengoptimalkan peran pajak untuk mengatasi defisit anggaran serta menurunkan pajak yang memberatkan rakyat miskin; serta (iii) mengefektifkan sisi belanja negara dengan melakukan peningkatan belanja modal serta alokasi investasi pada sektor krusial (infrastruktur dasar, pertanian dan UKM); meningkatkan agregat belanja sosial, khususnya anggaran pendidikan dan kesehatan serta pelayanan dasar lainnya, dan memilih jenis subsidi yang paling efektif dan menyentuh rakyat miskin.

Dalam menjawab tantangan tersebut, komitmen bagi pencapaian tujuan pembangunan millenium (MDGs) bisa menjadi alat dan arah bagi proses pengarusutamaan anggaran pro rakyat miskin. Target-target MDGs, seperti pengurangan kemiskinan, serta peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, air bersih maupun sanitasi, beririsan erat dengan tujuan akhir anggaran pro rakyat miskin. Namun, seperti halnya yang terbaca dari berbagai laporan internasional, kinerja pemerintah Indonesia

¹ Dikutip oleh Waidl, Sudjito, Bahagijo dalam "Mendahulukan Si Miskin; Buku Sumber bagi Anggaran Pro Rakyat", Prakarsa Jakarta, 2008, hal: 37.

² Dalam APBN 2008, total anggaran Rp. 854,6 Triliun. Alokasi Belanja Pegawai sebesar Rp. 128,3 triliun bantuan social sebesar Rp. 66,2 Triliun, sedangkan alokasi pembayaran bunga utang, subsidi, dan belanja lain-lain sebesar Rp. 214,1 Triliun, lihat: <http://www.presidentri.go.id/index.php/fokus/2008/01/02/2625.html>.

dalam upaya memenuhi target-target MDGs 2015 tersebut juga mengalami banyak kendala. Capaian Indonesia di bidang kesehatan, sanitasi dan air bersih masih tertinggal dibandingkan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara (GAPRI, 2008).

Oleh karena itu, Perkumpulan Prakarsa memandang perlu dilakukannya sebuah kajian mendalam tentang kebutuhan pembiayaan bagi pencapaian target MDGs 2015, serta efektivitas alokasi anggaran dan pelaksanaan program yang telah dilakukan bagi pemenuhan tujuan tersebut, khususnya yang terkait dengan target pengurangan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, dan air bersih serta sanitasi. Penelitian ini adalah bagian dari kerja-kerja yang dilakukan oleh Perkumpulan Prakarsa bersama dengan kelompok masyarakat sipil yang tergabung dalam *CSO Working Group on Pro Poor Budget* dalam upaya untuk mendorong pengarusutamaan anggaran pro rakyat miskin serta gambaran yang lebih akurat tentang kebutuhan pembiayaan bagi pencapaian target MDGs 2015.

Hasil kajian akan digunakan oleh *CSO Working Group on Pro Poor* dalam upaya mendesakkan *pro poor budget* ke Panitia Anggaran DPR RI dan Departemen Keuangan. Harapannya, Panggar dan Depkeu mempunyai *political will* dan rujukan bahwa *pro poor budget* adalah gagasan yang dapat diimplementasikan.

II. TOPIK PENELITIAN

2.1 Setiap usulan penelitian harus memfokuskan penelitiannya pada dua (2) fokus, yaitu:

1. **Efektivitas anggaran**
2. **Ketercukupan anggaran**

2.2 Dengan pilihan penelitian 4 (empat) bidang yang mengacu pada pemenuhan target MDGs 2015. Empat (4) pilihan bidang penelitian tersebut adalah:

1. Penanggulangan Kemiskinan

Dalam bidang ini, mengacu pada pemenuhan target MDGs tentang pemberantasan kemiskinan dan kelaparan ekstrem. *Pertama*, menurunkan proporsi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan menjadi setengahnya antara 1990-2015. Angka kemiskinan tahun 1990 adalah 15,1% dan tahun 2007 angka kemiskinan menjadi 16,6% setara dengan 37,2 juta penduduk (menggunakan ukuran pendapatan 1 US\$ per/hari). Target MDGs yang dipatok adalah menurunkan angka kemiskinan menjadi 7,5% (setengah dari tahun 1990).

Kedua, menurunkan proporsi penduduk yang menderita kelaparan. Angka kelaparan (termasuk balita) adalah 28%. Target MDGs yang dipatok adalah 14% (setengah dari jumlah penduduk yang menderita kelaparan).³ Di Indonesia, lebih dari 4 (empat) orang ibu meninggal setiap 1000 anak 7yang lahir hidup. Jumlah ini tertinggi di Asia Timur, hampir 2 kali lipat dari Filipina, tiga kali lipat dari Vietnam, dan 4 kali lipat dari Thailand.⁴

³ *Ibid*, hal: 5 – 9.

⁴ World Bank, *Berinvestasi dalam Sektor Kesehatan Indonesia: Tantangan dan Peluang untuk Pengeluaran Publik di Masa Depan*, 2008.

2. Kesehatan

Dalam bidang ini, mengacu pada pemenuhan target MDGs tentang: *Pertama*, penurunan Angka Kematian Anak (AKA) sebesar 32 kematian/1000 kelahiran hidup. Tahun 2007, AKA masih berjumlah 97 kematian/1000 kelahiran hidup. *Kedua*, penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) sebesar 110 kematian/100.000 kelahiran (rasionya adalah 3/4 dari AKI tahun 1990 sebesar 450 kematian).⁵

3. Pendidikan

Dalam bidang ini, mengacu pada pemenuhan target MDGs tentang pemenuhan akses pendidikan dasar bagi semua anak. Tingkat partisipasi sekolah dasar sudah mencapai 94,7%, tetapi pencapaian hingga kelas enam sekolah dasar baru 77%.⁶

4. Air Bersih dan Sanitasi

Dalam bidang ini, mengacu pada pemenuhan target MDGs tentang penurunan proporsi penduduk yang tidak memiliki akses yang berkelanjutan atas air minum dan sanitasi. Target MDGs 2015 adalah 67% dari kondisi akses air minum di 2006 sebesar 52,1%.⁷

2.3 Pertanyaan Kunci pada bidang-bidang penelitian, adalah:

(i) Efektivitas Anggaran

- a. Berapa besar anggaran yang telah dialokasikan [dalam 5 tahun terakhir]?
- b. Apa prioritas kebijakan/program?
- c. Sejauhmana efektifitas pengalokasian anggaran dalam mencapai target MDGs?
- d. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas alokasi anggaran?

(ii) Ketercukupan Anggaran

- a. Berapa besaran yang harus dialokasikan pada tahun 2010?
- b. Apa prioritas kebijakan/program yang menjadi prioritas pengalokasian?
- c. Faktor apa yang menghambat pemenuhan alokasi anggaran? Baik di ranah “politik anggaran” maupun “faktor struktural”?

Sebagai contoh; dalam *costing* yang dilakukan UNDP perkiraan biaya untuk pemenuhan hak-hak dasar warga negara atas; pangan, kesehatan, dan pendidikan harus disesuaikan juga dengan biaya pembangunan dan modal. Pada tahun 2004, *costing* UNDP atas atas hak dasar warga tersebut di atas, sebagai berikut:⁸

⁵ Stalker, *Kita Suarakan MDGs Demi Pencapaiannya di Indonesia 2007/2008*, UN – Bappenas, hal: 17 - 21.

⁶ Stalker, *Kita Suarakan MDGs...*, UN – Bappenas.

⁷ *Ibid.*

⁸ BPS – Bappenas - UNDP, *Indonesia Human Development Report 2004: “The Economics of Democracy” Financing of Human Development in Indonesia, 2004.*

Biaya Tahunan untuk Pembiayaan Hak-hak Dasar Warga Negara

	Current Annual Cost		Required increase, Rp. trillion	Full annual cost	
	Rp. trillion	% GDP		Rp. trillion	% GDP
Food security	4.8	0.27	-1.1	3.7	0.2
Basic health	8.4	0.47	5.2	13.6	0.77
Basic education	33.0	1.84	25.0	58.0	3.24
Physical security	7.5	0.42	20.9	28.4	1.59
Total	53.7	3.00	50.0	103.7	5.80

Sumber: UNDP, Indonesia Human Development Report 2004: "The Economics of Democracy", 2004.

Angka ini menunjukkan bahwa *public expenditure* perlu ditingkatkan, dari 3% dari PDB menjadi 6%.

III. METODOLOGI PENELITIAN

Para penulis dapat menggunakan pendekatan kualitatif atau pendekatan kuantitatif. Dengan pilihan pendekatan tersebut, peneliti diharapkan mampu memberikan jawaban-jawaban dari topik dan pertanyaan kunci penelitian. Peneliti diharapkan mampu memberikan bangun argumentasi serta analisis yang mencakup dimensi struktural dan tidak hanya dimensi teknokratis.

IV. JUMLAH PEMENANG DAN IMBALAN

Sayembara penelitian ini hanya akan memilih empat (4) pemenang (masing-masing tema akan dipilih satu pemenang. Tiap peneliti yang proposal penelitiannya lolos seleksi akan mendapatkan **hadiah penelitian** (sudah termasuk biaya penelitian dan honorarium) sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) dan pajak ditanggung oleh pemenang.

V. DURASI PENELITIAN

Penelitian dimulai pada tanggal 1 Juni 2009 s/d 30 September 2009.

VI. TAHAPAN PENELITIAN

Dengan perincian jadwal sebagai berikut:

NO	AGENDA	TANGGAL/DEADLINE
1	Publikasi sayembara penelitian	4 April 2009
2	Calon peneliti mengajukan proposal penelitian	6 April s/d 5 Mei 2009
3	Seleksi proposal penelitian	6 s/d 14 Mei 2009
4	Penetapan proposal terpilih oleh Panel Juri	15 Mei 2009
5	Pertemuan pemenang untuk presentasi dan penyamaan persepsi	26 Mei 2009
6	Pelaksanaan penelitian	1 Juni s/d 30 September 2009
7	Diskusi draft hasil penelitian	19 Agustus 2009
8	Presentasi akhir hasil penelitian	9 September 2009
9	Penyerahan hasil penelitian/laporan akhir	30 September 2009

VII. KRITERIA PENILAIAN

1. Proposal menunjukkan konsistensi antara tema dengan tujuan penelitian
2. Proposal yang diajukan menunjukkan ketajaman analisa dan kuatnya orisinalitas
3. Metodologi penelitian disertai *literature review*
4. Waktu dan biaya tidak melebihi dengan yang telah ditetapkan
5. Pengusul mempunyai kompetensi dan *track-record* yang mencukupi
6. Menyertakan lembar referensi (minimum dari 3 orang)

VIII. PERSYARATAN UMUM

1. Peneliti adalah dosen/akademisi, aktifis LSM/Ormas, jurnalis dan masyarakat umum
2. Penelitian dilakukan secara individual
3. Tiap peneliti hanya boleh mengajukan satu proposal dari 4 (empat) bidang tema yang ada
4. Penentuan pemenang akan dilakukan dalam rapat seleksi oleh Panel Ahli
5. Keputusan Panel Ahli bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.
6. Proposal ditulis dalam bahasa Indonesia maksimal 10 halaman (diluar lampiran) diketik dalam MS Word, font Time New Roman size 12, kertas ukuran A4, spasi 1, margin kiri 3,0 cm; kanan 2,5 cm, atas 2,5 cm.
7. Naskah proposal (soft copy atau hard copy) diterima di meja panitia **selambat-lambatnya tanggal 5 Mei 2009, pukul 16.00 WIB.**

Naskah *hard copy* dapat dikirim ke alamat panitia :

**Perkumpulan Prakarsa,
Jl. Jatipadang Utara No 10 – Jatipadang
Pasar Minggu Jakarta Selatan 12540
Telp. 021-7811-798**

→ Cantumkan **kode : AEP-MDG-2009** di sudut kiri atas amplop

Sedangkan pengiriman naskah proposal dalam **format soft copy** di kirim ke alamat e-mail :

proposal.aep-mdgs-2009@theprakarsa.org

8. Peneliti yang proposal tertulisnya lolos seleksi akan diundang untuk presentasi dan penyamaan persepsi tanggal 26 Mei 2009, dengan biaya akomodasi ditanggung Perkumpulan Prakarsa.

IX. PROPOSAL PENELITIAN

Format proposal penelitian, sekurang-kurangnya memuat :

1. **Cover (Nama pengusul/nama lembaga dan nomor kontak person)**
2. **Judul penelitian**
3. **Latar belakang**
4. **Pertanyaan penelitian/hipotesa**
5. **Metodologi dan literature review**
6. **Rencana kerja penelitian**

7. Rencana anggaran;
 - 7.1 Pembelian buku
 - 7.2 Biaya photo copy
 - 7.3 Transportasi
 - 7.4 Honorarium
8. Referensi literatur
9. Lampiran
 - 9.1 CV peneliti (1 halaman)
 - 9.2 Lembar referensi (1 halaman)

X. PANEL JURI

1. Perkumpulan Prakarsa
2. *CSO Working Group on Pro Poor Budget*
3. Muliadi Widjaja (Universitas Indonesia)
4. Hendri Saparini (ECONIT)
5. Jurnalis

XI. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Hak kekayaan intelektual dari hasil penelitian akan menjadi milik Perkumpulan Prakarsa.

XII. CATATAN LAIN

Alamat e-mail yang tercantum diatas (proposal.aep-mdgs-2009@theprakarsa.org) **khusus** digunakan sebagai alamat e-mail penerimaan proposal. Setiap pertanyaan dan kebutuhan konfirmasi atas sayembara ini, bisa dikirimkan **hanya** melalui e-mail ke : perkumpulan@theprakarsa.org

Jakarta, 4 April 2009
Perkumpulan Prakarsa